



Belum Sepakat Soal Kompensasi

■ Rencana Sterilisasi Kawasan Bong Suwung Jlagran Oleh KAI

YOGYA. TRIBUN - Puluhan warga Bong Suwung, Jlagran, Kalurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, terus menyuarakan penolakan sterilisasi kawasan Bong Suwung yang lokasinya termasuk dalam emplasemen Stasiun Yogyakarta. Mereka kembali menggelar aksi damai sekaligus audiensi di Kantor Daop 6 Yogyakarta, Selasa (24/9) siang.

Kuasa hukum Aliansi Bong Suwung, Ristu Basakara, mengatakan, hasil pertemuan dengan manajemen PT KAI Daop 6 Yogyakarta dinilai memberatkan warga. Dalam audiensi itu, warga Bong Suwung mengusulkan dilakukan pemagaran pada area emplasemen. Emplasemen sendiri merupakan kawasan terdiri dari banyaknya jalur rel yang digunakan sebagai perpindahan jalur kereta api.

Tuntutan pemagaran tersebut ditolak PT KAI sebab menurut mereka bangunan semi permanen Bong Suwung berada dalam pagar emplasemen. Selain itu, PT KAI juga tidak menyanggupi pemberian kompensasi secara penuh permintaan dari warga Bong Suwung sebesar Rp30 juta untuk pembangunan ulang warung, serta Rp20 juta bagi perempuan yang bekerja di tempat itu dengan spare waktu satu tahun. Nilai itu dianggap warga terlalu kecil dan tak mencukupi biaya sepenuhnya.

"Kompensasi hanya ongkos bongkar Rp200 ribu untuk bangunan semi permanen juga ditambah ongkos angkut Rp500 ribu per rumah. Padahal, kebutuhan yang punya warung sampai punya warung kembali per warung itu Rp30 juta,

- MASIH MENOLAK**

 - Puluhan warga Bong Suwung, Jlagran, Kalurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, terus menyuarakan penolakan sterilisasi kawasan itu.
 - Mereka kembali menggelar aksi damai sekaligus audiensi di Kantor Daop 6 Yogyakarta, Selasa (24/9) siang.
 - Usulan warga terkait pemagaran emplasemen Stasiun Yogyakarta ditolak KAI, sedangkan warga menolak besaran kompensasi pembongkaran bangunan.

Dan, untuk mbak-mbak di situ spare-nya Rp20 juta per orang, tapi itu ditolak," katanya, ditemui seusai audiensi.

Ristu menyampaikan, warga Bong Suwung sama halnya dengan masyarakat sipil lainnya yang memiliki KTP. Sehingga, menurut dia, Pemerintah DIY maupun Kota Yogyakarta, Kemantren Yogyakarta, serta KAI harus memberikan solusi terbaik. "Tetapi, korporasi dan pemerintah tidak bertanggung jawab. Karena, kami dari kemarin tidak mendapat respons," jelasnya.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyanto, menanggapi audiensi dengan warga Bong Suwung berjalan lancar dan dihadiri jajaran manajemen terkait. Perundingan ini dilakukan terkait dengan rencana sterilisasi aset Daop 6 yang berada di kawasan Bong Suwung seluas 2.800 meter persegi yang berlokasi di Jlagran, Pringgokusuman, Gedongtengen. Kris menuturkan, Daop 6 dalam sterilisasi ini akan bergerak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

"Daop 6 Yogyakarta sudah melayangkan Surat Peringatan ketiga pada 20 September 2024 yang berlaku selama 7 (tujuh) hari ke depan atau berakhir Kamis tanggal 26 Sep-

tember. KAI Daop 6 masih memberikan batas waktu hingga Jumat (27/9) jam 15.00 WIB bagi yang sepakat menerima kompensasi uang biaya bantu bongkar dan bantu angkut," ujar Kris.

Sebagian terima

la merinci biaya bantu bongkar sejumlah Rp200.000 per meter persegi untuk bangunan semi permanen dan Rp250.000 per meter persegi untuk bangunan permanen. Kemudian, juga ditambah Rp500.000 untuk biaya bantu angkut per hunian.

"Setelah tanggal 27 September 2024, Daop 6 Yogyakarta sudah bisa melakukan sterilisasi. Kondisi saat ini hampir 50% warga Bong Suwung sudah sepakat dengan rencana sterilisasi tersebut dan sebagian sudah menerima uang tanda sepakat untuk pembongkaran," tambahnya.

Kris melanjutkan bahwa nantinya uang kompensasi akan diberikan penuh setelah melakukan pembongkaran dan menandatangani berita acara. Kawasan Bong Suwung merupakan kawasan yang masih berada di area emplasemen Stasiun Yogyakarta. Upaya sterilisasi itu untuk mengembalikan fungsi emplasemen tersebut guna kegiatan operasional kereta api. (hda)



AKSI DAMAI - Puluhan warga Bong Suwung Yogyakarta menggelar aksi damai di depan kantor Daop 6 Yogyakarta, Selasa (24/9).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005